



REPUBLIK INDONESIA

PIDATO MENTERI KEUANGAN

**POKOK-POKOK KETERANGAN PEMERINTAH
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Disampaikan pada:

Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024 2025
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Jakarta, 1 Juli 2025

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.*

Yang kami hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

1. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat kembali menghadiri Sidang Paripurna Ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 DPR RI dengan **agenda Penyampaian Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024**, selanjutnya disebut RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2024.
2. Pada kesempatan yang baik ini, **Pemerintah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan APBN Tahun 2024 secara efisien, efektif, dan akuntabel**. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada DPR RI dan BPK atas kerja sama yang erat, pengawasan yang efektif, serta berbagai masukan konstruktif dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024.
3. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, **pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP dari BPK**. BPK bahkan memberikan penilaian terbaik, yang mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
4. Dukungan yang solid dan kolaborasi yang kuat seluruh pemangku kepentingan, memberi kontribusi yang positif untuk mewujudkan target pembangunan secara optimal, melaksanakan transisi pemerintahan secara efektif serta mampu mengawal **pelaksanaan APBN Tahun 2024**

tetap sehat dan kredibel sebagai instrumen kebijakan untuk pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

5. Sebelum kami menyampaikan pokok-pokok pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2024, **perkenankan kami untuk menyampaikan refleksi dinamika perekonomian yang terjadi sepanjang tahun 2024.** Hal ini penting untuk memperoleh gambaran secara utuh bagaimana kinerja APBN dalam menavigasi perekonomian, melindungi masyarakat dan upaya menjaga keberlanjutan fiskal.
6. **Memasuki tahun 2024, pengelolaan ekonomi nasional sangat menantang dan tidak mudah, terutama dengan tekanan pada perekonomian global yang meningkat tajam akibat ketegangan di sejumlah wilayah.** Belum usai konflik antara Rusia dan Ukraina yang sudah berlangsung sejak tahun 2022, tensi konflik di Timur Tengah juga mengalami peningkatan. Ditambah kontak militer fisik di sekitar Laut Merah yang menjadikan wilayah tersebut sebagai zona konflik maritim, memperburuk ancaman terhadap rantai pasok global. Aktivitas pelayaran yang melalui Terusan Suez sempat turun hingga 50% di paruh pertama tahun 2024.
7. **Permasalahan klasik antara Tiongkok dan Taiwan, yang melibatkan Amerika Serikat masih terus mengemuka.** *Psywar* antara kedua negara ini terus berlangsung, baik melalui kebijakan ekonomi maupun melalui aksi militer di sekitar perbatasan Tiongkok dan Taiwan. Pemerintah AS melalui *United States Trade Representative (USTR)* mengumumkan langkah signifikan menaikkan tarif impor atas produk Tiongkok di Mei 2024, terutama produk *Electric Vehicle (EV)* dari 25% menjadi 100%, baterai untuk EV dari 7,5% menjadi 25%, serta kenaikan tarif untuk bahan mineral kritis, baja, aluminium, dan panel surya. Disusul beberapa kali kenaikan lanjutan hingga akhir tahun 2024.

Perang dagang antardua negara terbesar di dunia menjadi variabel risiko ketidakpastian yang dampaknya merembet ke seluruh dunia termasuk Indonesia.

8. **Selain konflik antarnegara, tahun 2024 juga sangat kental diwarnai oleh fenomena “*Super Election Year*”.** Pemilu dilaksanakan di lebih dari 70 negara, termasuk di sejumlah negara yang tengah terlibat dalam konflik. Hal ini tentunya berdampak pada peningkatan risiko ketidakpastian yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi, tekanan terhadap pasar keuangan, perlambatan investasi, dan terganggunya rantai pasok global.
9. **Dampak langsung atas risiko ketidakpastian tersebut dapat kita rasakan.** Minyak mentah, komoditas utama yang banyak dihasilkan negara-negara di Timur Tengah, mengalami kenaikan harga hingga mencapai level USD91,2 per barel di awal April 2024. Melonjak tajam dibandingkan rata-rata harga sebelum konflik yang di bawah USD80 per barel. Demikian halnya biaya logistik, meningkat signifikan akibat rute logistik yang menjadi lebih panjang dan memakan waktu lebih lama.
10. **Tidak berhenti pada situasi tersebut, tantangan dampak El Nino juga masih berlanjut di tahun 2024.** Harga pangan dunia terutama beras melonjak. Selain dirupsi dari sisi produksi, tekanan harga diperburuk oleh proteksi ekspor komoditas pangan oleh negara-negara produsen untuk melindungi kebutuhan domestik. India, misalnya, membatasi ekspor beras, gula, dan bawang, sementara Rusia membatasi ekspor gandum, jagung, *barley*, dan minyak bunga matahari.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

11. **Situasi global yang menantang dan El Nino yang masih berlanjut berdampak pada perekonomian domestik di paruh pertama tahun 2024.** Pada saat yang sama, Indonesia juga melaksanakan Pemilu, dari

Pemilihan Presiden hingga Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah level Kabupaten/Kota.

12. **Dampak El Nino sangat dirasakan di dalam negeri, terutama pada sektor pangan.** Akibat El Nino, inflasi *volatile food* menyentuh 10,3% (yoy), mendorong *headline inflation* ke level 3,1% (yoy) pada bulan Maret tahun 2024. Beras menjadi penyumbang terbesar inflasi pangan pada saat itu. Untuk mengatasinya, Pemerintah bekerja keras melalui Bulog dengan menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar dan retail modern. Pemerintah juga mempercepat impor beras dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan untuk menambah stok nasional. Program bantuan sosial pangan (beras 10 kg) yang diberikan di akhir tahun 2023 untuk menopang daya beli masyarakat rentan akibat lonjakan harga pangan tetap dilanjutkan.
13. **Gejolak global juga memicu tekanan pasar keuangan domestik.** Pada bulan Juni 2024, nilai tukar Rupiah terdepresiasi tajam dari rata-rata di bawah Rp16.000 per USD pada awal tahun ke Rp16.486 per dolar AS, merupakan titik terlemah di tahun tersebut. Indeks harga saham gabungan turun dari kisaran 7.300 di awal 2024 hingga ke titik terendah tahun 2024 di 6.726,9 pada 19 Juni.
14. **Dengan latar belakang situasi tersebut, kita patut bersyukur karena perekonomian Indonesia menuju akhir tahun 2024 berangsur pulih, dari situasi berat di paruh pertama tahun 2024.** Pemilu yang berjalan dalam suasana yang aman dan damai, Pemilihan Presiden yang terlaksana dalam satu putaran menjadi modal yang kuat memasuki paruh kedua tahun 2024. Masa transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto yang berjalan *smooth* turut menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi dan politik.
15. **Pemerintah juga bekerja keras menjaga fundamental ekonomi tetap kuat dengan mengedepankan kredibilitas kebijakan, serta kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal dan makroekonomi.** Sinergi

yang erat antara kebijakan fiskal yang responsif dan kebijakan moneter yang *prudent* menjadi fondasi utama dalam memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap tekanan eksternal.

16. **Perkembangan domestik juga tidak terlepas dari dampak dari situasi global yang membaik.** Pemilu AS yang selesai dilaksanakan pada akhir November 2024 memberikan kepastian bagi pasar. Dari Tiongkok, Pemerintah juga memberikan stimulus baik fiskal maupun moneter, menjadi penggerak aktivitas ekonomi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia.
17. **Dengan situasi yang lebih kondusif di Semester kedua tersebut, diperkuat dengan langkah kebijakan Pemerintah, berbagai indikator ekonomi domestik membaik.** Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tercatat di level 5,03% (yoy), mencerminkan fundamental ekonomi yang resilien dalam menghadapi perlambatan global. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga di level 4,94% (yoy), dan investasi (PMTB) yang tumbuh 4,61% (yoy), menandakan aktivitas ekonomi domestik yang terus bergerak positif.
18. **Inflasi pada akhir tahun ditutup di level 1,6% (yoy), jauh di bawah asumsi APBN 2024 sebesar 2,8%, bahkan lebih rendah dari tahun 2023.** Capaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan pengendalian harga, terutama pangan oleh Pemerintah, tetapi juga mampu membantu menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dalam memberikan perlindungan sosial secara tepat sasaran.
19. **Pulihnya situasi tersebut tidak terlepas dari dioptimalkannya APBN sebagai *shock absorber* untuk melindungi masyarakat dan stabilitas ekonomi.** Salah satu bentuk nyata dari peran ini, ditempuh dengan pemberian bantuan pangan untuk membantu masyarakat terdampak El Nino dan penyaluran program Stabilisasi Pasokan Harga Pangan

- (SPHP) dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan memastikan keterjangkauan harga pangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
20. Di sektor energi, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan subsidi dan kompensasi untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat dari guncangan. Langkah ini penting untuk menahan laju inflasi dan menjaga daya beli, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Di samping itu, kebijakan subsidi pupuk tetap menjadi prioritas guna melindungi petani dan mendorong produktivitas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.
 21. **Pemerintah secara konsisten memberikan program perlindungan dalam rangka melindungi daya beli dan akselerasi pengentasan kemiskinan** yang antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Berbagai program tersebut merupakan instrumen penting dalam memperkuat jaring pengaman sosial, menjaga daya beli masyarakat miskin, serta memastikan akses terhadap pendidikan dan layanan dasar kesehatan. Selain itu, akses pembiayaan untuk pelaku usaha mikro dan kecil terus didorong melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan subsidi bunga yang diberikan, UMKM dapat meningkatkan produktivitas dan mengembangkan usahanya dengan *cost of fund* yang *affordable* bagi UMKM.
 22. Di sisi lain, APBN juga berperan sebagai *agent of development* tercermin dalam dukungannya terhadap agenda prioritas pembangunan antara lain untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam, mendorong transformasi ekonomi, ketahanan pangan dan energi termasuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak. Pemerintah senantiasa mendorong proses demokrasi berjalan secara aman, tertib, dan demokratis

sehingga pondasi penting bagi keberlanjutan pemerintahan dan stabilitas politik dan ekonomi nasional.

23. **Pemerintah secara konsisten mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan produktivitas, mobilitas dan konektivitas.** Dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diperkuat. PSN berperan penting dalam mempercepat konektivitas antarwilayah dan pemerataan pembangunan, sementara IKN menjadi simbol transformasi Indonesia menuju pusat pertumbuhan baru yang modern, hijau, dan berkelanjutan.
24. **Belanja negara juga diarahkan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting** yang masih menjadi tantangan pembangunan manusia di Indonesia. Melalui pendekatan multisektor dan program-program yang lebih terarah, pemerintah berupaya menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dan memperbaiki akses terhadap layanan dasar yang esensial.
25. Selain itu, Pemerintah juga memperkuat peran Transfer ke Daerah (TKD) guna meningkatkan kualitas layanan publik, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan mendorong kemandirian fiskal daerah. Berbagai instrumen TKD seperti DAK Fisik dan Non-Fisik diarahkan untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah dan sinergi pusat-daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.
26. Dengan berbagai program tersebut, realisasi belanja negara tahun 2024 mencapai Rp3.359,8 triliun atau tumbuh sebesar 7,6% dibandingkan 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi rakyat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan nasional.
27. Kebijakan belanja negara yang terarah dan terukur tersebut memberikan dampak nyata dalam peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 9,03% pada Maret 2024 (September 2024: 8,57%), sementara kemiskinan ekstrem terus menurun dengan capaian 0,83%. Tingkat pengangguran juga menunjukkan tren menurun menjadi 4,91% pada Agustus 2024.

28. Resiliensi perekonomian domestik, yang tercermin dari tetap tumbuhnya konsumsi, investasi, dan aktivitas produksi, memberikan dorongan positif terhadap penerimaan negara. Dalam tahun 2024, pendapatan negara mencapai Rp2.850,6 triliun atau tumbuh sebesar 2,4% dibandingkan 2023. Capaian ini menjadi indikasi bahwa pondasi ekonomi Indonesia tetap kuat dan mampu menopang ruang fiskal untuk melanjutkan agenda pembangunan. Selain aktivitas ekonomi domestik, capaian ini juga ditopang oleh efektivitas reformasi perpajakan, dan inovasi pelayanan berbasis digital yang meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi.
29. Dengan realisasi belanja dan pendapatan tersebut, defisit APBN 2024 terkendali dalam batas aman sebesar 2,3% terhadap PDB, lebih rendah dari proyeksi Laporan Semester yang sebesar 2,7% PDB. Ini mencerminkan kebijakan fiskal dikelola secara *prudent* dan berkelanjutan. Dengan capaian tersebut, keseimbangan primer juga berhasil mendekati posisi positif, yang menandakan konsolidasi fiskal yang semakin sehat.
30. Defisit anggaran ini dibiayai melalui bauran yang seimbang antara pembiayaan utang yang terkendali dan pemanfaatan pembiayaan non-utang yang produktif dan efektif. Langkah ini tidak hanya menjaga stabilitas fiskal jangka pendek, tetapi juga memperkuat pondasi fiskal jangka menengah dan panjang.
31. Sepanjang tahun 2024, realisasi pembiayaan utang dapat ditekan dari target yang ditetapkan dalam APBN 2024, seiring optimalisasi sumber pembiayaan yang efisien dan rendah risiko. Sementara itu, di tengah kebijakan suku bunga global yang masih tinggi, *yield* Surat Berharga

Negara (SBN) tetap terkendali, mencerminkan efektivitas strategi pembiayaan dalam menjaga efisiensi biaya utang dan memitigasi risiko pasar. Dengan pengelolaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan ini, kebijakan pembiayaan 2024 menjadi pondasi yang kuat dalam menyongsong pelaksanaan APBN 2025 yang sehat dan responsif terhadap tantangan pembangunan.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

32. Perkenankan kami menyampaikan ringkasan pokok-pokok capaian tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut.
33. Memasuki Tahun Anggaran 2024, posisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) berada pada angka Rp459,5 triliun. Setelah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan APBN, dan memperhitungkan SiLPA serta penyesuaian lainnya, Saldo Akhir Tahun tercatat sebesar Rp457,5 triliun. Saldo ini tetap berada pada level yang memadai dan berfungsi sebagai penyangga fiskal dalam menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian ke depan.
34. Sementara itu, Neraca Pemerintah per 31 Desember 2024 mencerminkan posisi keuangan yang solid, dengan Total Aset mencapai Rp13.692,4 triliun, Kewajiban Rp10.269,0 triliun, dan Ekuitas Rp3.423,4 triliun. Posisi ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang dapat diandalkan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
35. Dari sisi operasional, pendapatan yang dihimpun sepanjang tahun 2024 tercatat Rp3.115,3 triliun, lebih rendah dari beban operasional sebesar Rp3.353,6 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp238,3 triliun. Di sisi lain, kegiatan non-operasional mencatatkan surplus Rp22,7 triliun, sehingga defisit operasional secara keseluruhan tercatat Rp215,7 triliun.

36. Sebagai pelengkap dari informasi keuangan tersebut, Laporan Arus Kas Tahun 2024 menunjukkan aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris mencatat arus kas positif. Sementara itu, aktivitas operasi dan aktivitas investasi mencatatkan arus kas negatif. Namun demikian, arus kas negatif dari aktivitas investasi mencerminkan komitmen Pemerintah untuk terus melakukan investasi produktif guna mendorong akselerasi pembangunan nasional.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

37. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP. Pemerintah akan terus berupaya menjadikan LKPP sebagai instrumen yang tidak hanya andal secara akuntansi, tetapi juga semakin relevan dan berdaya guna dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berbasis bukti.
38. Sebagai bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, **Pemerintah secara konsisten menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi BPK**, termasuk yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP tahun-tahun sebelumnya.
39. Beberapa hal yang menjadi sorotan BPK antara lain: keselarasan antara Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) dan LKPP, perbedaan data penyetoran PPN dan PPh, pengendalian atas penganggaran dan realisasi belanja pegawai, pengelolaan sisa Dana Transfer ke Daerah (TKD), serta penyajian Belanja Dibayar Di muka dan Persediaan.
40. Dari hasil pemeriksaan atas LKPP 2024, **BPK menyampaikan 14 temuan yang harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti Pemerintah guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di masa mendatang**. Untuk itu, Pemerintah akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan, antara lain:

- a. Mengoordinasikan penyempurnaan regulasi dan pedoman pelaporan kinerja pemerintah demi terwujudnya integrasi dan keselarasan sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
- b. Mendorong penyelesaian atas indikasi kurang bayar perpajakan serta melakukan evaluasi atas sistem perpajakan sehingga permasalahan atas sistem perpajakan dapat termitigasi.
- c. Melakukan evaluasi perubahan mekanisme pelaksanaan anggaran Belanja Pegawai menjadi pagu tertutup, melakukan penyempurnaan sistem *early warning system*, serta melakukan koordinasi agar kebutuhan Belanja Pegawai dapat dihitung dengan lebih cermat.
- d. Melakukan penyesuaian batas waktu pelaporan realisasi penggunaan TKD yang terintegrasi dengan alur jadwal penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- e. Melakukan evaluasi dan menyempurnakan kebijakan akuntansi biaya dibayar di muka (BDDM) agar sesuai dengan karakteristik aset lancar.

Ibu, Bapak, para Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami muliakan,

41. Demikianlah Pokok-pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. RUU ini diajukan Pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas bersama dan selanjutnya dimintakan persetujuan untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.
42. Dengan ketulusan, kerja keras, integritas, dan sinergi yang kokoh, kita percaya bahwa semua itu menjadi modal utama dalam melanjutkan ikhtiar terbaik untuk menghadirkan kesejahteraan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhai dan memberkati setiap langkah kita dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Terima kasih.

*Billahit-Taufiq wal Hidayah, Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith Thariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh.
Om Shanti Shanti Shanti Om, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.*

Jakarta, 1 Juli 2025

a.n. Pemerintah Republik Indonesia

Menteri Keuangan,

ttd

Sri Mulyani Indrawati